

Persamaan dan Perbedaan Sistem Administrasi dan Bentuk Pemerintahan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Myanmar

Nadya Wulandari¹, Nurhasanatul Ilmi², Holliq Chandra Fadila³, Liana Marlina⁴,
Talitha Religi Dwi Yunitara⁵

1111210208@untirta.ac.id , 1111210229@untirta.ac.id , 1111210233@untirta.ac.id ,
1111210240@untirta.ac.id , 1111210325@untirta.ac.id

ABSTRACT

The administrative system of a country has a form that can influence the system in the form of government and its implementation. This research aims to find out the administrative systems in the Republic of Indonesia and Myanmar and to find out the differences and similarities in their forms of government. The research method used is a qualitative method which aims to uncover fundamental meanings, the emergence of motivation, and social processes that shape individual behavior and interactions. This can provide deeper understanding because it allows researchers to obtain information-rich data and contextual information. We chose a qualitative approach with secondary data analysis to conduct this research because it is efficient and relies on existing data, which can make it possible to analyze legal mechanisms, processes of legal formation and legal implementation or institutional frameworks that contribute to comparative legal practices of State Administrative Justice. between Indonesia and Myanmar, and the extent to which changes in State Administrative Justice Practices have been carried out in the two countries.

Keyword: *System of government, Form of government.*

ABSTRAK

Sistem Administrasi dari suatu Negara memiliki suatu bentuk yang dapat mempengaruhi sistem dalam bentuk pemerintahannya dan pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem Administrasi di Negara Republik Indonesia dan Negara Myanmar serta untuk mengetahui perbedaan maupun kesamaan di dalam suatu bentuk pemerintahannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap makna mendasar, munculnya motivasi, dan proses sosial yang membentuk perilaku dan interaksi individu. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya akan informasi dan informasi kontekstual. Kami memilih pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder untuk melakukan penelitian ini karena efisien dan bergantung pada data yang sudah ada, yang dapat memungkinkan untuk menganalisis mekanisme hukum, proses pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum atau kerangka kerja kelembagaan yang berkontribusi dalam perbandingan hukum Praktek Peradilan Tata Usaha Negara antara negara Indonesia dan Myanmar, dan sejauh mana perubahan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara itu dilakukan di dalam kedua negara tersebut.

Kata Kunci: *Sistem Administrasi, Bentuk Pemerintahan.*

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di dunia masing-masing negara mempunyai bentuk pemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kebutuhan tiap negara. Istilah asing bentuk pemerintahan ialah dari bahasa Belanda yakni *Regeringsvorm*, bahasa Prancis yakni *La forme de gouvernement*, bahasa Inggris yakni *The form of government*. Pengertian mengenai Pemerintahan secara luas merupakan suatu sistem pemerintah yang berdaulat secara penuh guna mengatur rakyat yang mendiami dan/atau menduduki suatu wilayah dan/atau tempat sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dengan berbagai lembaga negara yang berkuasa, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹

Bentuk pemerintahan sendiri memiliki dua (2) jenis yakni republik dan monarki.

a) Republik

Kata Republik berasal dari bahasa Latin yakni "*res publica*" yang artinya "kepentingan umum". Republik merupakan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.

b) Monarki

Monarki secara sempit dapat diartikan sebagai pemerintahan "kerajaan". Monarki merupakan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja yang bersifat turun temurun dan menjabat seumur hidup.

Bentuk pemerintahan Indonesia yakni Republik. Kepala negara dan kepala pemerintahan Indonesia dipegang oleh seorang Presiden. Kemudian negara Myanmar mempunyai bentuk pemerintahan yakni "Juntai Militer" yang lebih dikenal dengan sebutan "*The State Peace and Development Council (SPDC)*". Kepala Negara Myanmar dipimpin oleh Juntai (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan negara dalam suatu negara hukum terdapat aturan-aturan hukum yang tertulis dalam peraturan atau konstitusi yang tercakup dalam hukum tata negara. Namun, hukum tata negara tidak dapat melaksanakan secara penuh dalam menyelenggarakan persoalan teknis. Oleh karena itu, hukum tata negara membutuhkan hukum lain yang bersifat teknis yakni hukum administrasi negara.

Dalam bahasa Belanda istilah hukum administrasi negara berasal dari kata "*bestuursrecht*" yang artinya pemerintahan dan "*administratief recht*" yang artinya tata usaha, tata pemerintahan, dan tata usaha pemerintahan. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tindakan pemerintahan dan mengatur

¹ Prianto septian wira, "BAB II. Tinjauan Pustaka," in Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, vol. 1, 2018, 5-24.

hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antarorgan pemerintahan.² Jadi, hukum administrasi negara yakni keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana pemerintahan melaksanakan tugasnya.

Sistem administrasi negara Indonesia merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.³ Penjabaran tersebut secara menyeluruh dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sistem administrasi negara Indonesia terdiri dari berbagai bagian, seperti sistem kepemimpinan, sistem birokrasi, sistem manajemen, sistem pelayanan, dan sistem keuangan.⁴ Sistem administrasi negara Indonesia juga berkaitan dengan ilmu hukum, ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu negara, dan ilmu hukum tata negara.

Myanmar sebelumnya sempat menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sejak kemerdekaan di tahun 1948. Sejak saat itu, Myanmar dipimpin oleh Perdana menteri U Nu sampai pada tahun 1962. Kemudian pada tahun 1958, Perdana menteri U Nu dikudeta oleh kelompok militer yang dipimpin oleh Jendral Ne Win. Kudeta tersebut didasarkan krisis politik yang meningkat selama pemerintahan U Nu. Dan pada tanggal 2 Maret 1962, Pemerintahan U Nu dipaksa turun oleh Jendral Ne Win. Sejak saat itu, Myanmar berada dibawah pemerintahan militer dengan didukung Dewan Revolusi. Segala aspek di Myanmar di kontrol dan di awasi oleh Junta militer.⁵ *Statute Development and Peace Council (SDPC)* dibentuk pada tahun 1997 yang menunjukan peran militer didalam politik di Myanmar.

Awalnya SDPC dibentuk guna memperbaiki kondisi politik di Myanmar. Namun, junta militer hanya sibuk membungkam dan mengadili orang-orang maupun kelompok yang menentang tindakan otoriter junta militer.⁶ Negara Myanmar terbagi menjadi 21 administratif. Sebelum bulan Agustus 2010, Region dulu disebut sebagai Divisi, dan mereka dinamai sesuai dengan nama ibu kota mereka, kecuali Region Ayeyarwady dan Region Tanintharyi. Region bisa disebut mayoritasnya adalah bangsa Bamar, sedangkan negara bagian, zona, dan divisi lebih banyak bangsa minoritas. Dari segi banyak penduduk, Region Yangon memiliki yang paling besar dan terpadat, dan Negara Bagian Kayah adalah yang paling sedikit. Dari segi luas wilayah, Negara Bagian Shan lah yang terbesar, dan Region Yangon lah yang terkecil.⁷

² R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, (Amsterdam: Kobra, tt), hlm. 4

³ Sakti, Fajar Tri. "Sistem Administrasi Negara Indonesia." (2020).

⁴ Leksono, T. M. ., & Andriyanti, T. . (2023). Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia Dengan Filipina. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 8(7), 42-51. Retrieved from <https://ejournal.irpia.or.id/index.php/irpia-jurnal/article/view/239>

⁵ Mutiara Ita Dewi, *Pengalaman Militer Burma : Ebuah Analisis Historis-Politis*, n.d.

⁶ Ibid.

⁷ Menyatakan tujuh pemekaran sebagai daerah, pemekaran otonom dan kota markas daerah otonom, serta kabupaten dan kotapraja dalam wilayah persatuan. *Weekly Elven News* (2010).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem administrasi di negara Indonesia dan administrasi negara Myanmar?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan administrasi negara Indonesia dengan Myanmar?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu metode kualitatif. Kualitatif Pendekatan penelitian merupakan pendekatan metodologis yang menitikberatkan pada pemahaman dan menafsirkan fenomena sosial melalui eksplorasi mendalam dan analisis subjektif pengalaman, makna dan sudut pandang.⁸ Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang lebih fokus pada pengukuran dan analisis statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman konteks, makna, dan kompleksitas suatu fenomena. Pendekatan ini juga bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena atau konteks sosial tertentu secara komprehensif dalam kerangka kerja yang lebih luas. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap makna mendasar, munculnya motivasi, dan proses sosial yang membentuk perilaku dan interaksi individu. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang kaya akan informasi dan informasi kontekstual. Penelitian kualitatif juga sangat berguna dalam bidang-bidang seperti sistem hukum, yang mempelajari perilaku manusia, dinamika sosial, dan konteks budaya.⁹ Metode kualitatif termasuk mengumpulkan dan menganalisis data non-numerik, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen untuk mendapatkan wawasan kompleks yang relevan dengan topik penelitian.

Tentu saja, berbeda dari metode kuantitatif yang mengandalkan data numerik, penelitian kualitatif yang digunakan dalam karya ini berfokus pada deskripsi dan penggunaan kata-kata atau gambar. Fondasi teoritis dari penelitian ini dibangun di atas pendekatan kualitatif, yang sering digunakan untuk mengeksplorasi elemen sosial, budaya, dan ekonomi. Metodologi kualitatif, seperti metodologi ilmiah pada umumnya, menggunakan kerangka kerja ilmiah untuk memahami fenomena yang diamati melalui penggunaan teknik yang mapan. Dan berbeda dengan analisis kuantitatif, yang hanya berfokus pada hasil,

⁸ Putra, B. A. (2023). Complexities of the ethical dilemmas in Qualitative international relations research: research subjects, ethical codes, and constructing qualitative rigor. *Social Sciences*, 12(3), 157.

⁹ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman konteks yang kompleks.¹⁰ Sejalan dengan penelitian serupa yang menggunakan metode naturalistik dan dilakukan dalam pengaturan dunia nyata, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif selain metode kualitatif.

Pendekatan ilmu hukum ini mengumpulkan data dari sumber sosial seperti situs web resmi departemen pemerintah negara bagian. Kami memilih pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder untuk melakukan penelitian ini. Pendekatan ini efisien karena bergantung pada data yang ada, memungkinkan kita untuk menganalisis mekanisme hukum, proses pembentukan hukum dan pelaksanaan hukum atau kerangka kerja kelembagaan yang berkontribusi dalam perbandingan hukum Praktek Peradilan Tata Usaha Negara antara negara Indonesia dan Myanmar, dan sejauh mana perubahan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara itu dilakukan di dalam kedua negara tersebut.

Hasil dan pembahasan

1.1 Pembahasan 1

A. Administrasi Negara Indonesia

Administrasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *administration*. Administrasi dalam arti sempit yaitu tatausaha. Menurut Tehe Liang Gie administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Administrasi negara pada hakikatnya merupakan suatu system. Dimana suatu system dan subsistemnya saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling pengaruh-mempengaruhi sehingga seluruhnya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu. Administrasi negara Indonesia sebagai suatu sistem mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang didalamnya membahas tentang koordinasi dan hubungan kerja dalam pemerintahan negara.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) berdasarkan sistem pemerintahan negara, harus merupakan penjabaran dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dalam keseluruhan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur.

Perkembangan ekologi administrasi Indonesia era orde baru lebih identik dengan politik pemerintahan yang monolik sentralistik dengan kepemimpinan mantan Presiden Soeharto yang sarat dengan soldier leader. Dalam Bentuk wujud geografi Indonesia merupakan kepulauan, terdiri dari kurang lebih 17.667 buah

¹⁰ Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.

pulau besar dan kecil, dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan/lautan ± 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai ± 7,3 km persegi.¹¹

System Administrasi Negara Indonesia mempunyai unsur-unsur pokok, diantaranya:

1. Unsur Nilai

Unsur nilai disebut juga sistem nilai, meliputi landasan atau dasar negara yaitu Pancasila, cita-cita negara dan tujuan negara, semuanya telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang tetap tidak berubah walaupun UUD 1945 mengalami perubahan.

2. Unsur Struktur

Yaitu suatu kelembagaan yang diperlukan dalam kehidupan Negara Republik Indonesia yang demokratis dan konstitusional berupa tatanan kelembagaan penyelenggaraan negara dan pemerintah negara dalam mengembangkan visi misi bangsa.

3. Unsur Proses

Unsur proses terdiri dari proses penyelenggaraan Negara dan proses penyelenggaraan pemerintah negara.¹²

Untuk melaksanakan system administrasi negara Indonesia diperlukan aktor-aktor dalam melaksanakannya. Salah satunya adalah pejabat negara dalam penyelenggaraan negara berperan sebagai yang melaksanakan dari fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan

Dalam sistem Administrasi Nrgara Republik Indonesia akan tercipta mekanisme hubungan tugas/pekerjaan dan hubungan hukum antara para lembaga-lembaga penyelenggara Administrasi Negara, sehingga dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri, menjamin dan memperlancar pelaksanaan pencapaian tujuan Negara.¹³

B. Administrasi Negara Myanmar

Negara Myanmar adalah nama negara baru yang menggantikan nama lamanya, yaitu Burma. Negara ini merupakan salah satu diantara negara lain yang pernah melakukan pemindahan ibukota. Myanmar terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan negara Asia lain seperti Bangladesh di sebelah Barat, Thailand di sebelah Timur, China di sebelah Utara dan Laut Andaman di sebelah Selatan. Dahulunya bentuk pemerintahan Myanmar adalah Oligarki Militer atau terkenal

¹¹ Sakti, F. T. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. (Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Bandung, 2020).

¹² BA Novianto. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (2018).

¹³ Leksono, T. M. & Andriyanti, T. Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* 8, (2023).

dengan sebutan Junta Militer yang telah menguasai Myanmar dalam kurun waktu 46 tahun. Kekuasaan Militer terlama di Asia Tenggara ini tercatat sebagai sejarah dunia menyaingi rekor kekuatan militer Rusia.¹⁴ Myanmar dibagi menjadi 21 pembagian administratif. Sebelum bulan Agustus 2010, Region dulu disebut sebagai Divisi, dan mereka dinamai sesuai dengan nama ibu kota mereka, kecuali Region Ayeyarwady dan Region Tanintharyi. Region bisa disebut mayoritasnya adalah bangsa Bamar, sedangkan negara bagian, zona, dan divisi lebih banyak bangsa minoritas. Dari segi banyak penduduk, Region Yangon memiliki yang paling besar dan terpadat, dan Negara Bagian Kayah adalah yang paling sedikit. Dari segi luas wilayah, Negara Bagian Shan lah yang terbesar, dan Region Yangon lah yang terkecil.¹⁵

Negara Myanmar menganut system pemerintahan Presidensial. Dalam menjalankan pemerintahan dan urusan negaranya, presiden di Myanmar dibantu oleh dua orang wakil presiden. Namun, sekitar tahun 2016, presiden membentuk jabatan baru yang setara dengan Perdana Menteri, yakni Kanselir Negara (State Counsellor).¹⁶ Myanmar diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebanyak 54,7 juta. Penduduknya berasal dari berbagai suku bangsa, seperti Bamar, Shan, Karen, Kachin, Chinese, India, dan lain sebagainya. Mayoritas penduduk negara ini berasal dari suku Bamar. Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha Threvada. Agama ini kebanyakan dianut oleh kelompok suku Bamar, Rakhine, Shan, Mon, serta Chinese. Selain Buddha Threvada, penduduk negara ini juga ada yang menganut agama Kristen, misalnya suku Chin dan Karen, serta Islam yang dianut oleh kelompok Rohingya.¹⁷

1.2 Pembahasan 2

A. Perbedaan Administrasi antar Negara Indonesia dengan Negara Myanmar

Myanmar jatuh ke status keadaan darurat militer menyusul pengumuman dari wakil presiden 1 U Myint Swe yang menyerahkan selama satu tahun 3 cabang kekuasaan negara yaitu Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, milik Myanmar kepada Panglima Pertahanan, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, seperti dilansir Associated Press, Senin (01/02/2021).

Mengalihkan bentuk pemerintahan Myanmar menjadi Junta Militer yang di kenal dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). Kepala Negara Myanmar di pegang oleh Junta (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan

¹⁴ Aulia. Sejarah dan Bentuk Pemerintahan Negara Myanmar. *GuruPPKN.com* (2019).

¹⁵ Menyatakan tujuh pemekaran sebagai daerah, pemekaran otonom dan kota markas daerah otonom, serta kabupaten dan kotapraja dalam wilayah persatuan. *Weekly Elven News* (2010).

¹⁶ Ardian, M. A. & Priskap, R. Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Analisis Yuridis*.

¹⁷ Irewati, A. Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi. (2007).

dikepalai oleh perdana menteri ini yang menjadi perbedaan yang kontras dengan Indonesia sekarang ini.

Perspektif kinerja para anggota militer Myanmar sangat mempengaruhi administrasi negaranya untuk saat ini akibat militer mereka masih mudah untuk terhasut kedalam dunia politik. Sedangkan di negara kita Indonesia sama-sama mengetahui jika tugas militer di sebuah negara yaitu menjaga pertahanan serta keamanan suatu wilayah dan bahkan pihak yang tergabung dalam militer di Indonesia bahkan dicopot hak pilihnya dalam pemilu.

Retorikanisme yang terjadi di Myanmar termasuk kedalam pretorianisme oligarki. Dikarenakan sampai detik ini pemerintahan dikuasai oleh para elit militer, walaupun masih terdapat masyarakat sipil di dalam parlemen. Oleh karena itu, hanya ada satu partai saat ini yang ada di Myanmar yaitu partai yang dipimpin oleh elit militer. Hal ini mengakibatkan Negara Myanmar sulit dalam perekonomian namun juga terdapat pembatasan dalam hal melakukan ekspresi menyuarakan pendapat yang menjadi hak kebebasan seluruh manusia. Pemerintahan junta militer, tak segan-segan untuk menangkap bahkan memenjarakan para aktivis yang berbicara mengenai bentuk negara maka tengah membicarakan bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah.

Bentuk negara yang kesatuan biasa disebut NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), seperti Indonesia disebut pula sebagai hubungan vertical yang artinya pusat diasumsikan berada di atas daerah. Jadi seluruh wilayah yang ada di Indonesia mulai dari sabang hingga merauke harus patuh dan taat kepada satu kepala negara yaitu presiden dan semua wilayah juga harus menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, walaupun pada pelaksanaannya masing-masing wilayah juga diberikan hak untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing atau biasa disebut dengan otonomi daerah.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik Konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia dapat dikatakan menganut Trikameral (Tiga Kamar). Dengan mengikuti jalan pikiran John Locke, Montesquieu dalam bukunya "L'Esprit des Lois" yang ditulis tahun 1784 atau versi bahasa Inggris-nya dikenal "The Spirit of The Laws", mengklasifikasikan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang;
- c. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.¹⁸

¹⁸ Masnur Marzuki, "Pemisahan Kekuasaan Dan Prinsip Checks and Balances Dalam UUD 1945. .

B. Persamaan Administrasi antar Negara Indonesia dengan Negara Myanmar

Perbedaan Sistem administrasi tersebut dilihat dari implementasi nyata di era sekarang akibat kudeta militer, secara konstitusional nyatanya Negara Myanmar memiliki sistem administrasi negara yang sama dengan tiga cabang yaitu legislatif oleh Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw jika di Indonesia adalah DPR yang dibantu oleh DPRD dan DPD serta kekuasaan eksekutif oleh presiden dan yudikatif berdasarkan Konstitusi Burma tahun 2008.

Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan yaitu Republik Persatuan Myanmar sama halnya dengan Indonesia yang kekuasaan kedaulatan negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan rakyat.

Sebelum kemerdekaan, Myanmar memiliki dua kuasi-konstitusi, Undang-Undang Pemerintah Burma, 1935 dan Konstitusi Burma di bawah pendudukan Jepang, 1943. Setelah kemerdekaan, Myanmar mengadopsi tiga konstitusi pada tahun 1947, 1974 dan 2008. Konstitusi 2008 adalah konstitusi Myanmar saat ini.

Kepala desa juga menjalankan kekuasaan kuasi-yudisial tertentu untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan penghukuman, berdasarkan hukum. Pertama kali diatur berdasarkan undang-undang di bawah pemerintahan Inggris pada tahun 1907, pengaturan lokal ini diubah oleh Undang-undang Administrasi Wilayah atau Wilayah Desa tahun 2012, yang mengatur pemilihan melalui pemungutan suara rahasia untuk semua pejabat tingkat desa, sama halnya dengan Indonesia yang masih mengadopsi hukum yang hidup di masyarakat yaitu hukum adat sejalan dengan hukum nasionalnya.

Sebelumnya, Myanmar secara eksklusif menggunakan sistem first-past-the-post, yang mana seorang kandidat hanya memerlukan suara terbanyak di suatu daerah pemilihan untuk bisa terpilih. Pada 16 Juni 2022, Khin Maung Oo, anggota Komisi Pemilihan Umum, mengatakan pada konferensi pers di Naypyidaw bahwa negara tersebut akan menggunakan sistem perwakilan proporsional untuk pemilu sama halnya dengan Indonesia.

Penutup

Dari hasil pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Administrasi Negara pada hakikatnya merupakan suatu system dan subsistemnya saling ketergantungan satu sama lain, saling berinteraksi dan saling

Makalah Pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk Guru SMP" (Kota Yogyakarta, n.d.)

pengaruh-mempengaruhi sehingga seluruhnya merupakan suatu kebulatan yang utuh serta mempunyai peranan dan tujuan tertentu. Sebagaimana suatu sistem pemerintahan tersebut dibentuk sangatlah mempengaruhi bagaimana sistem administrasi suatu negara berjalan melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat tata usaha negaranya.

Dalam sistem Administrasi Negara Republik Indonesia akan tercipta mekanisme hubungan tugas/pekerjaan dan hubungan hukum antara para lembaga-lembaga penyelenggara Administrasi Negara, sehingga dapat menjamin terlaksananya sistem itu sendiri, serta menjamin dan memperlancar pelaksanaan pencapaian tujuan Negara. Sedangkan, dalam Administrasi Myanmar telah dibagi menjadi 21 pembagian administratif yang dimana Negara Myanmar menganut system pemerintahan Presidensial. Dalam menjalankan pemerintahan dan urusan negaranya, presiden di Myanmar dibantu oleh dua orang wakil presiden.

Perbedaan administrasi negara Indonesia dengan Myanmar yaitu terletak dalam bentuk pemerintahan suatu negaranya, di Negara Indonesia bentuk pemerintahannya yaitu konstitusional yang dipimpin oleh seorang presiden yang kekuasaannya dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Sedangkan, Negara Myanmar bentuk pemerintahannya yaitu presidensial namun administrasinya menitikberatkan pada militer sehingga, para anggota militer sangat mempengaruhi administrasi dari negaranya. Dalam persamaan administrasi negara Indonesia dan Myanmar dapat dilihat secara konstitusional dan bentuk negaranya. Negara Myanmar memiliki sistem admistrasi negara yang sama dengan tiga cabang yaitu legislatif oleh Pyithu Hluttaw dan Amyotha Hluttaw jika di indonesia adalah DPR yang dibantu oleh DPRD dan DPD serta kekuasaan eksekutif oleh presiden dan yudikatif berdasarkan Konstitusi Burma tahun 2008. Negara Myanmar berbentuk negara kesatuan yaitu Republik Persatuan Myanmar sama halnya dengan Indonesia yang kekuasaan kedaulatan negaranya mengacu pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada di tangan rakyat.

Daftar Pustaka

- Ardian, M. A. & Priskap, R. Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Analisis Yuridis*.
- Aulia. Sejarah dan Bentuk Pemerintahan Negara Myanmar. *GuruPPKN.com* (2019).
- BA Novianto. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2018).
- Crouch, Melissa "Dictators, democrats, and constitutional dialogue: Myanmar's constitutional tribunal" *Oxford University Press and New York University School of Law*. (2018), Vol. 16 No. 2, 421-446
- Irewati, A. Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi. (2007).

- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155-172.
- Konstitusi Burma 2008
- Konstitusi Burma 1947
- Konstitusi Burma 1974
- Leksono, T. M. & Andriyanti, T. Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan* 8, (2023).
- Makalah Pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk Guru SMP" (Kota Yogyakarta, n.d.)
- Masnur Marzuki, "Pemisahan Kekuasaan Dan Prinsip Checks and Balances Dalam UUD 1945.
- Menyatakan tujuh pemekaran sebagai daerah, pemekaran otonom dan kota markas daerah otonom, serta kabupaten dan kotapraja dalam wilayah persatuan. *Weekly Elven News* (2010).
- Mutiara Ita Dewi, Pengalaman Militer Burma : Ebuah Analisis Historis-Politis, n.d.
- Putra, B. A. (2023). Complexities of the ethical dilemmas in Qualitative international relations research: research subjects, ethical codes, and constructing qualitative rigor. *Social Sciences*, 12(3), 157
- Prianto septian wira, "BAB II. Tinjauan Pustaka," in Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undnag Dasar Tahun 1945, vol. 1, 2018, 5-24.
- R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, Een Inleiding*, (Amsterdam: Kobra, tt), hlm. 4
- Sakti, F. T. *Sistem Administrasi Negara Indonesia*. (Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Bandung, 2020).
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.

Artikel :

- Comparing Three Versions of The Myanmar (Burma) Constitution
https://comparativeconstitutionsproject-org.translate.google.com/translate/compare/compare-constitution/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc
- ICJ. Org. "Myanmar: Court structure"
<https://www.icj.org/cijl/countryprofiles/myanmar-introduction/general/court-structure/> (diakses pada 01/04/2024 Pukul 14.13 wib)
- Kompas.com. "Kudeta Myanmar Kuasai Eksekutif, legislative dan yudikatif militer umumkan pemilu tahun depan"
<https://www.kompas.tv/internasional/143190/kudeta-myanmar-k>

[uasai-eksekutif-legislatif-dan-yudikatif-militer-umumkan-pemilu-tahun-depan](#) (di akses pada 01/04/2024 Pukul 11.45 wib)

Next Myanmar General Election
[https://en-m-wikipedia-org.translate.google.com/wiki/Next Myanmar general election? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc](https://en-m-wikipedia-org.translate.google.com/wiki/Next_Myanmar_general_election?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc)

Representasi Proporsional
[https://en-m-wikipedia-org.translate.google.com/wiki/Proportional representation? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc](https://en-m-wikipedia-org.translate.google.com/wiki/Proportional_representation?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=tc)